

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan rancangan Rencana Kerja adalah merupakan langkah awal OPD untuk mendesain program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dengan mengacu pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Adapun muatan dalam rancangan Rencana Kerja, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 adalah:

1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu.
2. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan.
3. Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis OPD.
4. Dana indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

B. Dasar Hukum

Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2020 ini disusun dengan mempedomani:

1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan

- Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 15. Peraturan Menteri Sosial RI N0. 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Provinsi dengan Kabupaten/Kota;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
 19. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 6);
 20. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 16);

21. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Provinsi Jambi;
23. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 20016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun maksud disusunnya rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah untuk menggambarkan lebih terperinci mengenai rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Renja SKPD Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah:

1. Sebagai pedoman/acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam kurun waktu 1 tahun yaitu dari Tahun 2020 dan Pembuatan Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan kondisi yang diinginkan;
2. Sebagai pedoman kerja bagi aparatur Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi;
3. Adanya acuan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan rancangan Rencana Kerja Tahun 2020 pada Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penyusunan Rencana Kerja yang memuat uraian singkat, latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, struktur organisasi, sumber daya manusia serta sistematika penulisan rancangan awal Rencana Kerja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2018

Bab ini memuat struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi dan realisasi kegiatan anggaran yang dilaksanakan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2018.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN

Bab ini memuat Rencana Kerja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2020 yang dirumuskan dalam 10 (sepuluh) program pokok yang berisi tujuan dan sasaran.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2018

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2018 telah sesuai dengan ketentuan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA). Rencana Kerja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi. Dan gambaran umum program dan kegiatan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 11 kegiatan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 8 kegiatan.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan 1 kegiatan.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 3 kegiatan.
5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan 3 kegiatan.
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan 7 kegiatan.
7. Program Perlindungan, Pelayanan, Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan 1 Kegiatan.
8. Program Pembinaan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Bantuan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan 13 kegiatan
9. Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan 3 kegiatan.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan 9 (Sembilan) program yang dirinci kedalam 66 (enam puluh enam) kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	PERMASALAHAN
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa Surat menyurat	Terciptanya kelancaran surat menyurat	-
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Terwujudnya jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	-
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Terciptanya Jasa Administrasi Keuangan	-
4	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan dan Jasa Kebersihan kantor	Tersedianya Perlengkapan dan Jasa Kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan kantor	-
5	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Terciptanya Jasa Administrasi Keuangan	-
6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Elektorinik/penerangan bangunan kantor	Terciptanya Jasa Administrasi Keuangan	-
7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Elektorinik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Elektorinik/penerangan bangunan kantor	Terciptanya penerangan bangunan kantor	-
8	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Tersedianya makanan dan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	-
9	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Makanan dan Minuman	-

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	PERMASALAHAN
10	Presentase kegiatan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terpenuhinya kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	-
11.	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terpenuhinya kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
12	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung/kantor	Tersedianya kebutuhan peralatan gedung/ kantor	-
13	Kegiatan Pengadaan mebeleur	Terlaksananya Pengadaan mebeleur	Terpeliharanya Pengadaan mebeleur	-
14	Kegiatan Pengadaan komputer	Terlaksananya Pengadaan komputer	Terciptanya Pengadaan komputer	-
15	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	-
16	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	-
17	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	-
18	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	-
III	Peningkatan Disiplin Aparatur			

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	PERMASALAHAN
19	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan atributnya	Tersedianya perlengkapan pakaian dinas bagi aparatur	Terciptanya tata tertib berpakaian dinas	-
IV	Peningkatan kapasitas SDM			
20	Kegiatan Fasilitasi Jabatan Fungsional, Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur	Terpenuhinya kualitas SDM yang baik	-
V	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
21	Kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data PMKS seprovinsi jambi			
22	Kegiatan Penyusunan Laporan Rutin Program, Laporan Perkembangan SKPD, Penerapan SPM dan Laporan Keuangan dan Aset	Terlaksananya rakor penyusunan program kegiatan perpustakaan dan kearsipan	Terciptanya sinkronisasi program kegiatan perpustakaan dan kearsipan se-Provinsi Jambi	-
23	Kegiatan Rakor Sosial kabupaten/Kota seprovinsi Jambi	Terlaksananya monev perpustakaan dan kearsipan	Tersedianya laporan monev perpustakaan dan kearsipan	-
24	Kegiatan penyuluhan sosial pembangunan Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota seprovinsi Jambi	-	-	-
25	Kegiatan keikutsertaan pameran dalam dan luar daerah	-	-	-
26	Kegiatan pelayanan informasi publik bidang sosial	-	-	-

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	PERMASALAHAN
VI	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	-	-	-
27	Kegiatan Peningkatan Kesetiakawanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kesetiakawanan Sosial	Terciptanya Peningkatan Kesetiakawanan Sosial	-
28	Kegiatan Peningkatan Kapasitas BKKKS Provinsi Jambi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas BKKKS Provinsi Jambi	Terciptanya Kapasitas BKKKS Provinsi Jambi	-
29	Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna	Terlaksananya Pemberdayaan Karang Taruna	Terciptanya Pemberdayaan Karang Taruna	-
30	Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kessos Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM Kessos Masyarakat	Terciptanya Kualitas SDM Kessos Masyarakat	-
31	Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)	Terlaksananya Program Keluarga Harapan (PKH)	Terciptanya Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)	
32	Kegiatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Kapasitas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Terciptanya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	
33	Koordinasi Pelaksanaan CSR Bidang Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pelaksanaan CSR Bidang Kesejahteraan Sosial	Terciptanya CSR Bidang Kesejahteraan Sosial	
34	Rapat Teknis Pembinaan TKSK Kab/kota seprovinsi Jambi	-	-	-
VII	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	-	-	-
35	Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Kelurga Miskin (Pendampingan)	-	-	-

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	PERMASALAHAN
36	Kegiatan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP-FM) Bagi Fakir Miskin di Daerah Pedesaan dan Tertinggal	Terlaksananya Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP-FM)	Terciptanya Usaha Bagi Fakir Miskin di Daerah Pedesaan dan Tertinggal	
37	Kegiatan Bantuan Pengembangan KUBE-FM Bagi Fakir Miskin di Daerah Perkotaan	Terlaksananya Pengembangan KUBE-FM Bagi Fakir Miskin di Daerah Perkotaan	Terciptanya Usaha di Daerah Perkotaan	
38	Kegiatan Bantuan Pengembangan KUBE-FM Bagi Fakir Miskin di Daerah Pesisir dan Perbatasan	Terlaksananya Pengembangan KUBE-FM Bagi Fakir Miskin di Daerah Pesisir dan Perbatasan	Kegiatan Perlindungan Bantuan Sosial Bagi anak Penyandang PMKS KUBE-FM Bagi Fakir Miskin di Daerah Pesisir dan Perbatasan	
39	Kegiatan Verivali Data Fakir Miskin Lingkup Provinsi Jambi	-	-	-
40	Kegiatan Pemberdayaan KAT dan Bantuan Jadup Bagi Komunitas Adat Terpencil di Lokasi KAT	Terlaksananya Bantuan Jadup Bagi Komunitas Adat Terpencil di Lokasi KAT	Tersedianya Bantuan Jadup Bagi Komunitas Adat Terpencil di Lokasi KAT	
41	Kegiatan Verivali Data KAT di daerah Provinsi jambi	-	-	-
42	Kegiatan Koordinasi, pembinaan dan Monev Pemberdayaan KAT	-	-	-

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	PERMASALAHAN
43	Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar	Terlaksananya Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar	Tersedianya Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar	
44	Kegiatan Perlindungan Bantuan Sosial Bagi anak Penyandang PMKS (Anak terlantar, Anak Gelandangan, ABH, Anak Keluarga	Terlaksananya Kegiatan Perlindungan Bantuan Sosial Bagi anak Penyandang PMKS	Terciptanya Bantuan Sosial bagi PMKS	
45	Kegiatan Pemberdayaan Pengiriman dan Pemulangan Penyandang Disabilitas	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Pengiriman dan Pemulangan Penyandang Disabilitas	Terciptanya Pemulangan Penyandang Disabilitas	
46	Kegiatan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar melalui LKS Penyandang Disabilitas	Terlaksananya Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas	Terciptanya LKS Penyandang Disabilitas	
47	Kegiatan pelayanan panti disabilitas	-	-	-
48	Pelayanan Kebutuhan Panti Asuhan /Panti Jompo	Terlaksananya Kebutuhan Panti Asuhan /Panti Jompo	Terciptanya Kebutuhan Panti	
49	Kegiatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Luar Panti	Terlaksananya Pelayanan Sosial Lanjut Usia Luar Panti	Terciptanya Pelayanan Sosial	
50	Kegiatan Komda Lansia Provinsi Jambi	Terlaksananya Komda Lansia Provinsi Jambi	Terciptanya Komda Lansia	
VIII	Program Pembinaan, Pemberdayaan, Rehabilitasi Bantuan dan Jaminan Sosial PMKS			

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	PERMASALAHAN
51	Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Bantuan Sosial bagi Penerima Manfaat Program Kesejahteraan Sosial (PBI-Jamkes)	Terlaksananya Bantuan Sosial bagi Penerima Manfaat Program Kesejahteraan Sosial	Terciptanya Kesejahteraan Sosial (PBI-Jamkes)	
52	Kegiatan Meneruskan Perjalanan Orang Terlantar dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Terlaksananya Kegiatan Pemulangan Orang terlantar	Terciptanya kegiatan dengan baik dan lancar	
53	Kegiatan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pada tanggap Darurat	Terlaksananya Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terciptanya Keadaan aman dan kondusif	
54	Pelayanan Kebutuhan Panti Asuhan /Panti Jompo	Terlaksananya Kebutuhan Panti Asuhan /Panti Jompo	Terciptanya Kebutuhan Panti	
55	Kegiatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Luar Panti	Terlaksananya Pelayanan Sosial Lanjut Usia Luar Panti	Terciptanya Pelayanan Sosial	
56	Kegiatan Komda Lansia Provinsi Jambi	Terlaksananya Komda Lansia Provinsi Jambi	Terciptanya Komda Lansia	
57	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pencatatan Sipil di Kabupaten dan Kota se Provinsi Jambi	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pencatatan Sipil di Kabupaten dan Kota se Provinsi Jambi	Terciptanya Singronisasi Data Penduduk di Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi	
58	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Wanita Penyandang PMKS	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan PMKS	Terciptanya Pelatihan Keterampilan PMKS	
59	Kegiatan Pelayanan Sosial di rumah singgah bagi Tuna Sosial	Terlaksananya Pelayanan Sosial di rumah singgah	Terciptanya Pelayanan Sosial	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	PERMASALAHAN
60	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi penyandang penyakit Sosial (Eks Napi, Tuna Sosial, ODHA. dan kelompok Minoritas)	Terlaksananya Keterampilan Berusaha bagi penyandang penyakit Sosial	Terciptanya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	
61	Penyuluhan sosial Bahaya Narkoba, HIV-AIDS dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan NAPZA dan Tuna Sosial			
62	Pengiriman /fasilitasi klien narkoba ke panti rehabilitasi	-	-	
63	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Psikotik			
64	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi	-	-	
65	Kegiatan pelayanan panti Gelandangan dan pengemis	-	-	
66	Unit Pelayanan Sosial Keliling	Terlaksananya Pelayanan Sosial Keliling	Terciptanya Pelayanan Sosial	
IX	Program Penataan Administrasi Kependudukan			
67	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk di Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi	Terlaksananya Pendaftaran Penduduk di Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi	Terciptanya Kesamaan Data antara Kabup[at]en/Kota dengan Provinsi	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	PERMASALAHAN
68	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pencatatan Sipil di Kabupaten dan Kota se Provinsi Jambi	Terlaksananya Pencatatan Sipil di Kabupaten dan Kota se Provinsi Jambi	Terciptanya Kesamaan Data antara Kabup[atn/Kota dengan Provinsi	
69	Kegiatan Koordinasi,Pembinaan dan Sosialisasi Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan dari Pencatatan Sipil	Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan dari Pencatatan Sipil	Terciptanya Kesamaan Data antara Kabup[atn/Kota dengan Provinsi	

Dan penjabaran sasaran yang ditetapkan dalam 9 (Sembilan) program yang diuraikan dalam 69 (enam puluh sembilan) kegiatan sebagai berikut:

1. **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase pelayanan administrasi yang efektif dan efisien dilingkungan Dinas.
2. **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan aparatur.
3. **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**
Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan disiplin kerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.
4. **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan kualitas aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.
5. **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan program, keuangan dan asset dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.
6. **PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan kualitas kelembagaan, SDM kessos yang mumpuni.

7. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasarnya.

8. PROGRAM PERLINDUNGAN, PELAYANAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)

Program Perlindungan, Pelayanan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), kinerja yang ingin dicapai adalah persentase KAT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

9. Program Penataan Administrasi Kependudukan

kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

1. Pelayanan Umum

Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi sebagai lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi jambi, dalam melaksanakan kegiatan dalam kedudukannya yang mengacu pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi. Pelayanan Organisasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan administrasi dengan berorientasi pada peningkatan kinerja dan kebutuhan pelayanan.

- b. Meningkatkan ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang efektif sesuai dengan proporsi kerja yang dibebankan kepada SKPD.
- c. Meningkatkan disiplin aparatur melalui pemenuhan kebutuhan aparatur yang efektif dan efisien.
- d. Meningkatkan kapasitas dan SDM aparatur melalui pembinaan dan peningkatan pengetahuan aparatur.
- e. Meningkatkan Sistem Pengembangan Sistem Pelaporan Organisasi, melalui penajaman visi dan misi organisasi dan Pemerintah Provinsi Jambi ke dalam Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan pelayanan sektor publik.
- f. Meningkatkan ketersediaan Basis Data Terpadu PMKS dalam rangka penentuan arah dan kebijakan penyelenggaraan pembangunan Kessos.

2. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Isu-isu strategis diidentifikasi melalui kebijakan dan kegiatan pembangunan masa lalu yang mempengaruhi visi, misi, output, biaya dan atau manajemen.
- b. Cara mengidentifikasi dan memilih selanjutnya mempengaruhi keputusan bagaimana Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi melakukan perencanaan, realisasi dan pengawasan pembangunan Bidang Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Jambi.

Adapun isu strategis yang menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan strategis pembangunan dalam bidang Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

a. Isu Strategis Bidang Sosial

Adapun yang menjadi *Isu Strategis* dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Jambi adalah :

- Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan Fakir Miskin yang belum optimal.
- Pemberdayaan PMKS dan Fakir Miskin belum berorientasi kepada peningkatan produktivitas dan taraf hidup PMKS.
- Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terus meningkat, yang mengakibatkan upaya penanganan dan pelayanan yang semakin tinggi serta membutuhkan alokasi dana yang tidak sedikit.
- Sarana dan Prasarana Panti dalam penerapan SPM belum memadai.
- SDM Pekerja Sosial Profesional sangat terbatas.
- Peran TKSK dalam penyelenggaraan Kessos belum maksimal.
- Belum optimalnya pemberdayaan KAT oleh Kabupaten.
- Rendahnya kualitas pelayanan sosial yang disebabkan oleh tidak konsistennya anggaran dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Skala Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.
- Terbatasnya jumlah tenaga fungsional pekerja sosial untuk melakukan pendampingan sosial.
- Meningkatnya korban pencandu narkoba, yang memerlukan proses rehabilitasi dan pelayanan sosial.
- Banyaknya permintaan pelayanan lanjut usia terlantar dalam panti pemerintah (PSTW), namun kapasitas panti sangat terbatas (70 orang)

b. Isu Strategis Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Adapun yang menjadi *Isu Strategis* dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Jambi adalah :

- Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk.
- Rendah kualitas penduduk dalam pemenuhan administrasi kependudukan.
- Belum optimalnya pengelolaan dan pendataan penduduk di Kabupaten/Kota, hal ini ditandai dengan adanya penduduk yang belum terdaftar sehingga tidak memiliki identitas, distribusi penduduk pindah dan datang, dan pencatatan ke dalam dokumen kependudukan.

- Masih terdapat jumlah penduduk yang tidak tercatat dalam pencatatan sipil kependudukan, antara lain pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2020 sesuai dengan Rencana Strategis. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi adalah membantu Gubernur melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan gambaran umum program dan kegiatan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 11 kegiatan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dengan 5 kegiatan.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan 1 kegiatan.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 1 kegiatan.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 3 kegiatan.
6. Program Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka dengan 3 kegiatan.
7. Program Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca dengan 5 kegiatan.
8. Program Pelayanan, Pengolahan dan Akuisisi Arsip dengan 3 kegiatan.
9. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Arsip dengan 3 kegiatan.

Melalui ke 9 (sembilan) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dari setiap misi Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dirumuskan secara spesifik,

realistis dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, sehingga sasarannya adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Program yang telah ditetapkan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Maka kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal, termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

Untuk mengukur input dan output perlu indikator yang jelas dari setiap kegiatan karena indikator kinerja adalah merupakan alat ukur yang spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capai kinerja suatu program atau kegiatan.

A. Tujuan dan Sasaran Program/Kegiatan Tahun 2020

Pada Tahun 2020 mendatang Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi sebagian masih melaksanakan program/kegiatan seperti tahun ini (2019) serta ditambah dan dikurangi beberapa kegiatan.

Secara rinci rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang akan dilaksanakan dalam tahun 2020 dapat dijabarkan dalam 10 (Sepuluh) program dan 60 (enam puluh) kegiatan sebagai berikut:

Adapun tujuan dari program/kegiatan Tahun 2020 adalah:

- a. Terwujudnya kinerja organisasi yang efektif, efisien dan transparan menuju good governance.

Dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya kinerja organisasi Sosdukcapi yang efektif, efisien dan transparan.
 - Meningkatnya opini Dinas Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.
 - Penerapan SOP dan peningkatan dinamisasi urusan Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta implementasi regulasi pada OPD dan masyarakat.
- b. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS sesuai Standar Teknis SPM Bidang Sosial.

Dengan sasaran sebagai berikut:

- Pengembangan dan rehabilitasi Panti
 - Peningkatkan kerjasama dalam pengelolaan panti non pemerintah.
 - Penyediaan permakanan dan pakaian sesuai standar
 - Penyediaan kebutuhan hidup dasar sehari-hari
 - Penyediaan layanan pendidikan dan keterampilan
 - Penyediaan alat bantu bagi disabilitas
 - Pendampingan psikososial.
 - Peningkatan kualitas SDM Peksos dalam panti
 - Penyedia sarana penunjang panti
 - Penyediaan akses layanan administrasi kependudukan dan akte kelahiran
 - Penyediaan akses layanan kesehatan tingkat dasar
 - Penyediaan akses kesempatan kerja bagi klien
- c. Terwujudnya pengentasan kemiskinan bagi penyandang Fakir Miskin Perdesaan, Perkotaan dan Daerah-daerah pesisir, dan perbatasan antar Provinsi

Dengan sasaran sebagai berikut:

- Memberikan kemudahan dalam memperoleh akses bantuan usaha bagi Fakir Miskin.
- Menyiapkan petugas pendampingan dalam upaya membantu meningkatkan usaha kelompok.
- Memberikan bantuan pemberdayaan sosial bagi keluarga rentan dan penyandang fakir miskin melalui KUBe.
- Melakukan verifikasi data fakir miskin cakupan provinsi

- d. Terwujudnya kebutuhan dasar bagi warga KAT secara layak

Dengan sasaran sebagai berikut:

- Penguatan fungsi Pokja KAT.
- Pendampingan sosial
Untuk perubahan perilaku melalui upaya motivasi, sikap, mental dan spiritual warga KAT dalam menjalankan fungsi sosial kemasyarakatan.

- Membangun komunikasi sosial yang berkesinambungan untuk mencegah terjadinya konflik sosial.
 - Melakukan upaya pendataan warga KAT melalui BDT untuk menjadi calon penerima KPM.
 - Menyediakan bantuan hidup dasar bagi warga KAT (Jadup) yang telah memiliki ID.
- e. Terwujudnya pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sesuai dengan PUPK dan pelayanan sosial lainnya
- Dengan sasaran sebagai berikut:
- Melakukan upaya-upaya pendampingan sosial bagi penyandang tuna sosial yang rentan mengalami trauma (Eks. Tuna Susila, WRSE dan ODK).
 - Menyiapkan pelayanan di rumah singgah yang berorientasi kepada pemberdayaan keterampilan
 - Menyiapkan skema pelatihan yang efektif dan berdampak kepada usaha yang produktif.
 - Meningkatkan pelayanan PMKS dalam panti
 - Meningkatkan peran Komda Lansia
 - Memfasilitasi aksesibilitas pelayanan panti sosial non pemerintah.
 - Meningkatkan distribusi penyaluran logistik dan bantuan bagi korban bencana dan pendampingan psikososial.
- f. Terwujudnya peran serta organisasi sosial/lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam usaha penyelenggaraan kessos
- Dengan sasaran sebagai berikut:
- Memberikan fasilitasi pemberdayaan bagi organisasi sosial.
 - Memberikan kemudahan dan akses pembentukan wadah penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - Membangun kerjasama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - Mendayagunakan LKS dan organisasi sosial lainnya serta mendorong sumber daya potensial yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial.
 - Mensosialisasikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat
 - Meningkatkan profesionalitas pekerja sosial, PSM, Tagana, dan TKSK.
 - Pendayagunaan dan pemberdayaan tenaga penyuluh sosial sebagai perpanjangan informasi kessos.
 - Meningkatkan ketersediaan data PMKS setiap tahun.
 - Mendorong peningkatan kesejahteraan TKSK dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pembangunan kessos
- g. Terwujudnya pengelolaan dan penataan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

- Dengan sasaran sebagai berikut:
- Membangun kerjasama antara dinas yang menangani kependudukan di Kabupaten/Kota.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan program dengan Kementerian terkait.
- Mendorong instansi pengelola data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam memberikan kemudahan dalam pencatatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- Mengembangkan pola penataan system kependudukan yang akuntabel, mudah dan bebas pungutan.

BAB IV

PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2020

Adapun program dan kegiatan yang menjadi rencana kerja pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kelompok Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				
1.	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat menyurat yang dikelola	Administrasi kantor	Provinsi Jambi	APBD
2.	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening	Administrasi kantor	Provinsi Jambi	APBD
3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah adm. Pengelola keuangan	Tenaga adminstrasi keuangan	Provinsi Jambi	APBD
4.	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah paket pelayanan jasa kebersihan kantor	Administrasi kantor	Provinsi Jambi	APBD
5.	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Administrasi kantor	Provinsi Jambi	APBD
6.	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penggandaan	Administrasi kantor	Provinsi Jambi	APBD
7.	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	Administrasi kantor	Provinsi Jambi	APBD
8.	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	Dinas Sosdukcapil	Provinsi Jambi	APBD
9.	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makan dan minum rapat	Dinas Sosdukcapil	Provinsi Jambi	APBD
10	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Dinas Sosdukcapil	Provinsi Jambi	APBD

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kelompok Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana
11.	Kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor	-	Dinas Sosdukcabil	Provinsi Jambi	APBD
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				
12.	Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jmlh kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	Dinas Sosdukcabil	Provinsi Jambi	APBD
13.	Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor	Dinas Sosdukcabil	Provinsi Jambi	APBD
14.	Kegiatan pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	Dinas Sosdukcabil	Provinsi Jambi	APBD
15.	Kegiatan Pengadaan Komputer	Jumlah computer	Dinas Sosdukcabil	Provinsi Jambi	APBD
16.	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang diperlihara	Dinas Sosdukcabil	Provinsi Jambi	APBD
17.	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan kantor	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	Dinas Sosdukcabil	Provinsi Jambi	APBD
18.	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dirawat	Dinas Sosdukcabil	Provinsi Jambi	APBD
19.	Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Dinas Sosdukcabil	Provinsi Jambi	APBD
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				
20.	Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian PDH	Dinas Sosdukcabil	Provinsi Jambi	APBD

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kelompok Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				
21.	Kegiatan fasilitasi jabatan fungsional, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	Jumlah PNS yang mengikuti bintek	Pegawai Dinas Sosdukcapil	Provinsi Jambi	APBD
22.	Kegiatan rapat-rapat Koordinasi/Bimbingan Teknis SIKS-NG dan SLRT	-	Dinas Sosdukcapil	Provinsi Jambi	APBD
VI	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya				
25.	Kegiatan pemberdayaan KUBe Pengembangan bagi fakir miskin perkotaan	Jumlah KK Keluarga miskin yang diberikan pemberdayaan dan fasilitasi usaha	Masyarakat Miskin	Provinsi Jambi	APBD
26.	Kegiatan pemberdayaan KUBe pengembangan bagi fakir miskin perdesaan	Jumlah KK keluarga miskin yang diberikan pemberdayaan dan fasilitasi usaha	Masyarakat Miskin	Provinsi Jambi	APBD
27.	Kegiatan Pemberdayaan KUBe pengembangan bagi fakir miskin pesisir dan daerah tertinggal	Jumlah KK keluarga miskin yang diberikan pemberdayaan dan fasilitasi usaha	Masyarakat Miskin	Provinsi Jambi	APBD
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN, PELAYANAN, PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)				
28.	Kegiatan bantuan jadup bagi warga komunitas adat terpencil di provinsi	Jumlah warga KAT yang memperoleh bantuan jadup	Masyarakat KAT	Provinsi Jambi	APBD

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kelompok Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana
	jambi	untuk memenuhi kebutuhan dasar			
VIII	PROGRAM PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, REHABILITASI, BANTUAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)				APBD
31.	Kegiatan pelatihan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah pelaksanaan penilaian	Masyarakat	Provinsi Jambi	APBD
32.	Kegiatan Rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus	Masyarakat	Provinsi Jambi	
32.	Kegiatan Pelayanan Panti Jompo	Jumlah lansia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi dasar dalam panti	Masyarakat	Provinsi Jambi	APBD
36.	Kegiatan penanggulangan korban bencana alam pada tanggap darurat	Jumlah korban bencana alam yang memperoleh bantuan logistik pada kondisi pasca bencana	Masyarakat	Provinsi Jambi	APBD
37.	Kegiatan penanggulangan korban bencana sosial (orang terlantar dan pekerja migrant bermasalah sosial)	Jumlah korban bencana sosial (orang terlantar dan PMBS) yang dipulangkan ke daerah asal	Masyarakat	Provinsi Jambi	APBD
38.	Kegiatan pembentukan dan pembinaan kampung siaga bencana	Jumlah lokasi tanggap bencana yang dipersiapkan	Masyarakat	Provinsi Jambi	APBD

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kelompok Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana
39.	Kegiatan Rehabilitasi sosial bagi wanita tuna sosial	Jumlah wanita tuna sosial yang mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi sosial	Masyarakat	Provinsi Jambi	APBD
40.	Kegiatan Rehabilitasi sosial bagi eks. Psikotik dalam panti	Jumlah penyandang eks. Psikotik yang memperoleh keterampilan kerja	Masyarakat	Provinsi Jambi	APBD
43.	Kegiatan pemberdayaan, pengiriman dan pemulangan penyandang cacat (disabilitas)	Jumlah PACA yang memperoleh pemberdayaan	Masyarakat	Provinsi Jambi	APBD
45.	Kegiatan Komda Lansia Provinsi Jambi	Jumlah komite yang menyelenggarakan kessosbagi lansia	Masyarakat	Provinsi Jambi	APBD
46.	Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi bantuan jaminan sosial bagi penerima manfaat program kesejahteraan sosial (PBI Jamkes)	Jumlah KPM yang difasilitasi	Masyarakat	Provinsi Jambi	APBD
49.	Kegiatan Unit Pelayanan sosial keliling (UPSK)	-	Masyarakat	Provinsi Jambi	APBD
50.	Kegiatan pelayanan sosial di rumah singgah bagi tuna sosial dan KAT	-	Masyarakat	Provinsi Jambi	APBD
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	-	-	-	APBD
51.	Kegiatan peningkatan kesetiakawanan nasional (HKSAN) tingkat provinsi	Mewujudkan esensi kesetiakawanan sosial	Dinas Sosdukcapil	Provinsi Jambi	APBD

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kelompok Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana
52.	Kegiatan peningkatan kapasitas BKKKS provinsi Jambi	Meningkatkan peran lembaga sosial guna mendorong pemberdayaan masyarakat	Dinas Sosdukcabil	Provinsi Jambi	APBD
53.	Kegiatan pemberdayaan karang taruna	Meningkatkan peran orsos guna mendorong pemberdayaan lembaga sosial sebagai potensi kesejahteraan sosial	Masyarakat	Provinsi Jambi	APBD
54.	Kegiatan peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah peksos/tksk/psm yang dioptimalkan dalam penyelenggaraan kesos	Masyarakat	Provinsi Jambi	APBD
55.	Kegiatan kapasitas lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga	Jumlah LKS	Masyarakat	Provinsi Jambi	APBD
56.	Koordinasi penyelenggaraan program keluarga harapan (PKH)	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan program yang efektif	Dinas Sosdukcabil	Provinsi Jambi	APBD
57.	Koordinasi pelaksanaan CSR Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah dunia usaha dalam mendukung program CSR	Dinas Sosdukcabil	Provinsi Jambi	APBD
X	PROGRAM PENATAAN DAN PEMANFAATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	-	-	Provinsi Jambi	APBD
58.	Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pendaftaran penduduk di kabupaten dan kota se provinsi jambi	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan pendaftaran penduduk	Dinas Dukcabil Se Provinsi Jambi	Provinsi Jambi	APBD

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kelompok Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana
59.	Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pencatatan sipil di kabupaten dan kota se provinsi jambi	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan pencatatan sipil	Dinas Dukcapil Se Provinsi Jambi	Provinsi Jambi	APBD
60.	Kegiatan koordinasi , pembinaan da sosialisasi pengembangan system administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan pemanfaatan system adm. Kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Sosdukcapil	Provinsi Jambi	APBD
	J U M L A H				

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) merupakan salah satu dokumen perencanaan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk itu maka Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi menyusun rancangan Rencana Kerja Tahun 2020 ini sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun mendatang sekaligus sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.